

Konflik Identitas Dan Budaya Antar Suku Di Yogyakarta, Heterogenisasi Vs Homogenisasi (Dinamika Peran Keraton Dan Filosofi Keistimewaan Yogyakarta Dalam Menangani Konflik)

Muhammad Rouf Mustofa¹, Ita Rodiah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Laksda Adisucipto. Kec. Depok. Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 55281

Email: roufmustofa117@gmail.com

Abstract— Student groups or communities living in Yogyakarta create fuses that can catch fire at any time. Groups in Yogyakarta have the potential to experience offense caused by various aspects. The frequent occurrence of identity and ethnic conflicts is quite disturbing, especially for indigenous people. Yogyakarta society is facing the challenge of homogeneity in particular, long before theories and studies about the dangers of homogeneity, there were several special philosophies that the Yogyakarta people always adhered to in carrying out their life roles. The role of the Palace and the implementation of the special philosophy in Yogyakarta has not been fully understood by most people, especially immigrants. The collaboration between the religious patterns of Yogyakarta society and the philosophy of privilege is very closely related to the concept of Islam Nusantara. Indirectly, it is hoped that such collaboration with the heterogeneous society of Yogyakarta can reduce homogenization conflicts, both religious and cultural. One of them is the "Imaginary Axis". The Imaginary Axis is visualized in the form of three special places in Yogyakarta which include Mount Merapi, Tugu Yogyakarta, Keraton, Panggung Krupyak, and South Beach. The Imaginary Axis symbolizes harmony and balance in nature. Nature here consists of five aspects, namely fire from Mount Merapi, soil from the earth of Nga-Yogyakarta, air from the South Coast, wind, and space. So the Imaginary Axis philosophy can be interpreted as a harmonization between the environment and the physical, namely balance in the relationship between humans and God, humans and fellow humans, and humans and nature. This article reviews the relationship between religion and culture with the Yogyakarta philosophical axis using a phenomenological literature review data analysis framework.

Keywords: Yogyakarta, Heterogenisasi, Homogenisasi, Conflict

I. PENDAHULUAN

Dikenal sebagai Kota pelajar dan kota ber-kebudayaan, tidak menjadikan Yogyakarta terbebas dari kasus-kasus yang melibatkan antar suku bahkan agama. Kelompok-kelompok mahasiswa atau masyarakat yang berdomisili di Yogyakarta memunculkan sumbu-sumbu yang sewaktu-waktu dapat terbakar. Sentuhan antaretnis sangat rentan dengan konflik, baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Hal ini disebabkan ikatan emosional dalam etnis membentuk entitas yang sangat kuat. Disadari atau tidak setiap etnis akan bersaing dalam memperebutkan pengaruh, fasilitas, kesempatan maupun ekses-ekses kehidupan lainnya yang ketersediaannya terbatas. Akibatnya tumbuh prasangka etnis. Bentuk sederhananya adalah ketidaknyamanan akibat hidup penuh saling prasangka dan curiga. Akumulasinya dapat menjadi bentuk yang ekstrim, yaitu pertikaian dan bahkan perperangan. Menurut Lull (1998), nilai-nilai tersebut dapat menjadi "memetics" yang siap dipindahkan atau mengandalkan diri dalam benak-benak anggota etnis. Keadaan tersebut perlu dicari alternatif pemecahan untuk mengendalikannya.

Penelitian ini melihat tumbuhnya prasangka etnis dalam perspektif teori Fenomenologi. Studi Fenomenologi merupakan studi pengetahuan yang berasal dari kesadaran (*consciousness*). Fenomenologi menjadikan pengalaman aktual yang ada (*lived*) sebagai data terhadap realitas. Individu menginterpretasikan secara subjektif setiap pengalamannya sebagai dasar pemberian terhadap realitas dan tindakan. Prasangka etnis kerap terjadi di tanah air bahkan tak jarang berakibat fatal. Serangkaian kerusuhan sosial yang terjadi di Indonesia seperti kerusuhan Sambas dan Sanggau Ledo (Kalimantan Barat), Ambon (Maluku), Poso (Sulawesi Tengah), Sampit (Kalimantan Tengah) tidak terlepas dari dimensi etnis dan agama, walaupun terdapat faktor-faktor seperti kesenjangan struktural dan ketidakadilan sistem. Kelompok-kelompok yang ada di Yogyakarta sangat berpotensi mengalami ketersinggungan yang disebabkan dari berbagai macam aspek.

Yogyakarta sebagai kota pelajar dan pariwisata tidak luput dari adanya prasangka etnis. Hal ini disebabkan banyaknya pendatang dari berbagai daerah yang datang ke Yogyakarta, baik sekedar untuk wisata, mencari nafkah, maupun untuk melanjutkan studi. Berbagai etnis ada di Yogyakarta ini seperti Jawa khususnya sebagai penduduk asli, Sumatra, Cina, Arab, dan Indonesia Bagian Timur. Seperti disinyalir dalam Kompas.com, Gubernur DIY menegaskan, Yogyakarta saat ini telah mengalami kemunduran. Pasalnya, selama 50 tahun terakhir, di wilayah ini, tidak pernah ada kasus perkelahian antar-etnis, tetapi sekarang kejadian itu marak terjadi. Seperti yang diberitakan, dalam konflik yang melibatkan mahasiswa NTT, Maluku, dan Papua di Babarsari, Sleman di salah satu tempat hiburan. Kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi di daerah tersebut yang memang dikenal sebagai wilayah domisili orang timur. Lebih jauh, Sultan memandang, keberadaan asrama etnis cenderung memunculkan egoisme kedaerahan yang berpotensi menimbulkan konflik (www.mojok.co diunggah tgl 18/07/2022).

Dengan kejadian seperti itu bagaimana sebuah filosofisi diterapkan kepada seluruh pendatang yang kemungkinan sangat kuat membawa budaya kedaerahannya. Peran agama dan kebudayaan seperti apa yang kemudian dapat dijadikan sebagai sebuah solusi atas konflik yang berkali-kali terjadi didaerah yang terkenal dengan kenyamanan baik dalam lingkup Pendidikan, pariwisata, dan masyarakatnya. Maka dari itu penelitian ini mencoba mengkaji beberapa artikel jurnal yang secara terstruktur melihat bagaimana masyarakat heterogen Yogyakarta memandang sebuah fenomena, dan bagaimana sebuah filosofis diterapkan dalam masyarakat luas.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan masuk dalam kategori *Literature Review*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh dari artikel-artikel Jurnal dengan kajian konflik dan konsep kebudayaan masyarakat Yogyakarta. Sementara data sekunder diperoleh melalui berita-berita online dan dokumen atau arsip terkait konten-konten media yang relevan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konflik Identitas

Pada forum diskusi virtual yang diadakan oleh Lembaga Kajian Dialektik (LKD) dengan narasumber Prof. Al. Makin, Ph.d dan Rezky Tuanany memberikan garis besar bahwa ancaman gerakan homogenisasi dikalangan pemuda sendiri eksklusivisme menjadi awal dari tindakan intoleran. Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat bertukar ide dan gagasan, saat ini malah menjadi tempat bersarangnya paham-paham ekslusif. Pentingnya mengenal budaya dan tradisi kelompok yang lain bisa di dapatkan dalam forum-forum dialog, pengalaman berdialog dengan lintas agama, lintas kelompok menjadikan pemuda khususnya semakin Indonesia dengan segala kemajemukannya. Sementara itu penekanan pentingnya mengenalkan keragaman melalui Pendidikan. Menurut prof. Al-Makin, Pendidikan saat ini belum mampu melahirkan paradigma yang inklusif, sebaliknya malah mencetak orang-orang berpaham eksklusif. Gerakan mengenalkan keragaman melalui Pendidikan merupakan investasi besar dalam jangka waktu yang Panjang. Sejalan dengan itu di Indonesia sendiri beberapa kelompok besar keagamaan sangat vocal terhadap pentingnya memahami keberagaman dan toleransi antar umat. Pentingnya mengenalkan konsep-konsep keragaman dan toleransi ini di era globalisasi khususnya Indonesia dipermudah dengan berbagai media seperti film, youtube, dan berbagai platform lainnya. Sikap menyeragamkan atau homogenisasi muncul dari minimnya pengetahuan tentang keragaman. Oleh karena itu, penting mengenalkan suku, budaya, dan agama lain ditengah-tengah masyarakat, baik melalui Pendidikan formal maupun non-formal atau juga bisa dalam lingkup organisasi keagamaan.³

Pemberitaan di media massa dan hasil studi yang dilakukan oleh akademisi menyatakan bahwa terjadinya konflik antar etnis di Yogyakarta akibat dari kesenjangan sosial, ekonomi dan politik antara etnis pendatang dengan etnis Pendatang lainnya.

Nurrachman, Elgi Livia dalam salah satu analisisnya “konflik sosial mahasiswa Papua di Yogyakarta melibatkan ormas, aparat, pemerintah dengan mahasiswa Papua di asrama kamasan I jl.Kusumanegara, konflik yang awalnya laten tersebut, berubah menjadi manifest pada tanggal 14 Juli 2016 lalu, konflik ini sejatinya disebabkan oleh kompleks persoalan dan permasalahan yang hadir sebelum-sebelumnya.”. pada 23 Agustus 2022 kasus lain terulang yang dimuat dalam Kompas.com “Keributan Pecah di Asrama Mahasiswa Papua Yogyakarta, Satu Orang Tewas”.⁴ kronologis kericuhan ini terjadi ketika berlangsungnya rapat di Asrama yang kemudian terjadi konflik saling lempar dan penganiayaan yang mengakibatkan salah satu korban meninggal. Konflik- yang terjadi di Yogyakarta yang melibatkan etnis luar jawa cenderung membawa luka lama yang belum selesai. Bukan tidak mungkin kedepannya konflik-konflik seperti ini akan memakan lebih banyak korban, melihat bagaimana Indonesia memiliki sejarah kelam konflik antar suku. Sebelumnya juga di bulan Juli ditahun yang sama di Wilayah Babarsari terjadi kerusuhan yang

³ Nasir Muhtar, Mengenalkan Keragaman, Upaya Mencegah Homogenisasi, [klikers.id](http://www.klikers.id/read/special-klik/mengenalkan-keragaman-upaya-mencegah-homogenisasi/?amp=1) <https://www.klikers.id/read/special-klik/mengenalkan-keragaman-upaya-mencegah-homogenisasi/?amp=1>

⁴ <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/08/24/115018978/keributan-pecah-di-asrama-mahasiswa-papua-yogyakarta-satu-orang-tewas?page=ll>

melibatkan mahasiswa asal Indonesia Timur di tempat Karaoke. Menurut salah satu Dosen Sosiologi UGM Muhammad Najib Azca⁵, sering terjadinya konflik antar etnis ini karena kurangnya ruang-ruang sosial perjuangan antar etnis. Sehingga kantong-kantong komunitas akan saling bersinggungan diruang public seperti, café, mall, dll.

Gambaran tentang pluralitas pemaknaan teks-teks faktor eksternal dari berbagai sumber data tersebut sesuai dengan pandangan pasca strukturalisme bahwa terdapat perbedaan pandangan antar berbagai pihak dalam memaknai kesenjangan Agama, ekonomi, sosial, dan politik pada masyarakat di Yogyakarta. Perlindungan terhadap warga minoritas sebagaimana dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rahmawati⁶ juga tidak sepenuhnya terjadi pada warga asli Yogyakarta lainnya jika mengacu pada teks berikut ini: "Sejarah tradisi halal-bihalal lintas agama di Kampung Gendingan juga tidak lepas dari adanya konflik antarumat beragama sekitar tahun 2010. Pada saat itu, sekelompok warga mencurigai ada upaya dari warga umat Katolik untuk mempengaruhi keimanan warga muslim melalui aksi pemberian hadiah. Isu tersebut mengakibatkan hubungan antarwarga di Kampung Gendingan jadi terganggu."

Berpjidak dari dua kutipan teks di atas dapat dianalisis disini bahwa terdapat fakta warga minoritas yang berdomisili di Yogyakarta tidak sepenuhnya dilindungi oleh warga Yogyakarta. Selain itu juga terdapat fakta bahwa terjadi ketimpangan ekonomi dan politik yang berkembang sejak masa Orde Baru dimana banyak warga etnis China yang menguasai sektor-sektor ekonomi dan posisi politik yang strategis di Yogyakarta.⁷ Adanya aturan pembatasan warga etnis China untuk menduduki posisi strategis dalam birokrasi, Ekonomi di Yogyakarta juga merefleksikan adanya sentimen negative terhadap para pendatang. Dekonstruksi terhadap berbagai teks tentang ketimpangan Agama, sosial, ekonomi dan politik pada masyarakat multi etnis di Yogyakarta dapat digunakan sebagai bagian dari solusi persoalan harmoni sosial yang dipengaruhi oleh faktor eksternal tersebut.⁸ Artinya, salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam penciptaan harmoni sosial masyarakat multi etnis di Yogyakarta adalah reduksi kesenjangan di bidang agama,sosial, Budaya, ekonomi dan politik antar etnis-etnis pendatang dengan kajian penerapan filosofi Keistimewaan Keraton.

B. Filosofi Keistimewaan Yogyakarta

(Poros Imajiner, Negoro Mowo Toto Deso Mowo Coro, Hamemayu Hayuning Bawana)

Tradisi adalah unsur kebudayaan yang sangat penting. Tradisi adalah kebiasaan bersama yang dilakukan oleh manusia dalam masyarakat, yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu. Adapun sumber kebiasaan bersama itu adalah tata nilai dan cita rasa yang hidup di dalam masyarakat. Tata nilai adalah pengertian baik buruk, benar-salah, pantas-tidak pantas, adil tidak adil, dan halal tidak halal, yang semuanya bersumber pada agama, kepercayaan, mitologi, dan ideologi yang hidup di dalam masyarakat itu. Adapun cita-rasa adalah pilihan-pilihan naluriyah di dalam hal kepuasaan panca indera dan kepuasaan perasaan, yang terbentuk oleh ingatan akan pengalaman-pengalaman yang berabad-abad dalam bergaul dengan alam lingkungan dan dari tempat tinggal mereka. Apabila tata nilai dan cita rasa adalah isi di dalam yang membentuk tradisi, maka penerapannya/implementasinya berwujud etika, tata cara, sopan santun, basa-basi, ekspresi seni, cara berpakaian, cara bertani, cara berternak, cara berteknologi, dan cara mengolah makanan dan sebagainya.⁹

Adapun bentuk pelembagaan tradisi yang paling matang adalah hukum adat. Pelanggaran terhadap tata cara, sopan santun dan etika bisa menimbulkan reaksi tidak suka, cemooh, amarah, kebencian dan kutukan dari masyarakat. Jadi etika merupakan sesuatu ikatan yang *constrength*. Pelanggaran terhadap hukum adat menimbulkan sanksi yang lebih berat lewat denda, pengucilan, pembuangan atau bahkan hukuman mati. Hukum adat adalah hasil dari tradisi budaya yang sangat matang dan kuat. Hukum adat memberikan kepastian tertib hidup bersama yang kokoh kepada setiap orang dalam masyarakat dan memberikan jaminan kedaulatan manusia, karena hukum adat kedudukannya lebih tinggi dari pemimpin masyarakat/ raja.

Begini pula dengan filosofi daerah seperti, Poros (sumbu) imajiner Yogyakarta, yaitu Gunung Merapi – Tugu – Kraton-Panggung Krupyak – Laut Selatan. Sumbu imajiner menjadi acuan perkembangan kota dimana bangunan publik penting diletakkan berdasarkan sumbu tersebut, sedangkan jalur-jalur utama antar kota bersilangan tegak lurus dengan sumbu imaginer. Secara simbolis filosofis, sumbu imajiner melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Sedangkan dalam konsep *Negoro Mowo Toto Deso Mowo Coro* seperti yang dilakukan Airlangga diawal abad ke-11 di masa lalu. Waktu itu beliau berumur 17 tahun. Beliau mewarisi masalah-masalah sosial politik dari pemerintahan kakaknya, Raja Dharmawangsa yang baru lengser. Kohesi masyarakat kacau balau, ketatanegaraan

⁵ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/07/083200665/mengapa-konflik-antar-etnis-kerap-terjadi-di-babarsari-yogyakarta-?page=all>

⁶ Jurnal SMArt Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi Volume 06 No. 01 Juni 2020 Website Journal: <http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart> DOI: <https://doi.org/10.18784/smart.v6i1.988>

⁷ <http://hmfpis.student.uny.ac.id/2020/11/21/kebencian-dan-diskriminasi-terhadap-etnis-tionghoa-di-indonesia/#>

⁸ Nusantara, 2011, "Jogja Miniatur Indonesia" Nusantara.edisi pertama tahun 2012."Refleksi Sewindu IKPMD INDONESIA YOGYAKARTA".

⁹ Umi Salamah. Membangun Karakter Jati Diri Bangsa Melalui Gerakan Literasi Sastra Terhadap Nilai-Nilai Budaya Masa Lalu Dengan Cara Pandang Masa Kini. SENASBASA (*Seminar Nasional Bahasa dan Sastra*) Edisi 1 Tahun 2017 Halaman 439-454 E-ISSN 2599-0519

amburadul. Apa yang pertama beliau lakukan? adalah memerintahkan semua desa adat yang berbagai ragam adat istiadatnya satu sama lain yang tentu saja berbeda, karena desa nelayan tidak mungkin sama adatnya dengan desa pertanian, dan tidak sama pula dengan desa undagari atau kemasan, begitu seterusnya. Semua desa adat itu diminta untuk meninjau dan menyusun kembali hukum adat mereka, agar lebih adil dan lebih mampu membuka diri dalam pergaulan yang lebih luas. Sesudah itu beliau perintahkan agar hukum adat itu punya pengawal yang dinamakan Dewan penjaga adat yang berjumlah 40 orang untuk setiap desa adat. Inilah ide yang bahkan kita yang hidup di dunia modern ini tidak ada, para ahli tata Negara kita dan para elit politik kita tidak menciptakan pengawal untuk hukum, sehingga hukum kita menjadi tidak mandiri dan tidak terkawal. Tetapi, apa yang diciptakan Airlangga menciptakan tata hukum yang mandiri dan terkawal. Sesudah itu, beliau juga menyusun hukum kerajaan untuk mempersatukan semua kepentingan dalam masyarakat yang unsurnya berbedabeda itu. Bukan untuk menyeragamkan, tetapi untuk menciptakan harmoni dari kepentingan-kepentingan yang dibiarkan untuk tetap berbeda-beda.¹⁰

Hal ini serupa dengan kondisi Yogyakarta saat ini, keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan manusia lain sudah dikatakan amburadul dengan banyaknya kejadian antar identitas. Mulai memudarnya adat dan budaya di Yogyakarta ini tidak dapat disalahkan hanya karena kedatangan suku lain di Indonesia, tetapi melihat juga bagaimana masyarakat local memandang dan memberikan ruang terhadap masyarakat pendatang. Harmoni ini yang perlu dikaji ulang oleh kalangan akademisi, organisasi kemahasiswaan, dan juga pemerintah keraton tentunya agar melihat fenomena ini tidak hanya dari satu sisi.

Nilai filosofi *Hamemayu Hayuning Bawono* merupakan sebuah gambaran besar dari pemahaman makrokosmos dari seorang Sultan Hamengku Buwono X yang dibawa pengaruhnya dalam Pemerintahan DIY. Sejatinya *Hamemayu Hayuning Bawono* merupakan konsepsi yang mampu menjadi lintasan bagi tema, konteks, ruang, dan waktu. Konsep *Hamemayu Hayuning Bawono* sudah ada sejak *swargi dalam* Hamengku Buwono I yang pada dasarnya konsep meliputi dengan adanya pemahaman tentang kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya stimulasi intelektual dari *Hamemayu Hayuning Bawono* oleh Sultan Hamengku Buwono diturunkan kedalam beberapa nilai *Hamemayu Hayuning* lainnya. Penulis menemukan penjabaran data dari stimulasi intelektual *Hamemayu Hayuning Bawono* sebagai pemahaman yang lebih dalam akan nilai piker Sultan Hamengku Buwono X dalam Buku Panduan Penggunaan Danais DIY Tahun 2020 yang kurang lebih dapat dibagi kedalam; 1. Pembangunan lingkungan dan tata ruang fisik, dengan penekanan terhadap penciptaan ruang ruang wilayah DIY yang *Rahayu*, tidak eksploratif, serakah, dan sewenang-wenang. 2. Pembangunan Ekonomi, dengan penekanan terhadap nilai filosofi *Hamemayu Hayuning Kawula*. 3. Pembangunan Sosial, dengan penekanan terhadap nilai filosofi *Hamemayu Hayuning Bebrayan*. 4. Pembangunan Pendidikan, dengan penekanan nilai filosofi *Hamemayu Hayuning Rasa Cipta Karsa*. 5. Pembangunan Teknologi, dengan penekanan nilai filosofi *Hamemayu Hayuning Karya*. 6. Pembangunan Budaya, dengan penekanan nilai filosofi *Hamemayu Hayuning Budhaya*. 7. Pembangunan Hukum, dengan penekanan nilai filosofi *Hamemayu Hayuning Kautaman*.¹¹

Hamemayu Hayuning Bawana dalam penjabaran nilai *Rahayu* dan nilai *Hamemayu Hayuning* yang lainnya. Konsepsi ini diwujudkan oleh Sultan Hamengku Buwono X sebagai seorang Gubernur untuk memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai luhur tersebut menjadi ciri khas yang dibawa oleh seorang Sultan Hamengku Buwono dari “kediaman” Budaya Jawa Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat kedalam “Rumah Tangga” Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membawa Manusia Jogja yang Bermartabat. Selain itu sinergi antar nilai/ konsep/ pengetahuan Filosofi DIY sebagai stimulasi intelektual dari Sultan Hamengku Buwono X merupakan sebuah hal yang satu padu dan sinergi dalam pelaksanaannya, olehnya ketika berbicara filosofi satu akan berkaitan dengan filosofi-filosofi lainnya.

C. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Dalam Mewujudkan Spirit Kemajemukan

Kiprah Sultan Hamengku Buwono X sebagai pemimpin merupakan sebuah hasil kolaborasi dari nilai intelektual yang luhur masa lampau yang diadaptifkan oleh Sultan dengan kondisi DIY sekarang untuk menjawab tantangan-tantangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, terlebih dalam menjaga tujuan keistimewaan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Sultan Hamengku Buwono X memiliki kiprah yang besar sebagai pemimpin yang transformatif. Dengan beberapa kejadian konflik Identitas terutama dalam ranah suku dan agama yang sering terjadi di Yogyakarta, bagaimana peran Keraton dalam mengimplementasikan Filosofi-filosofi keistimewaan dan hajat masyarakat luas, yang kita tahu Yogyakarta saat ini diisi oleh masyarakat berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia.¹²

Fokus konflik identitas seharusnya menjadi salah satu motivasi pemerintah untuk menunjukkan bahwa Yogyakarta masih menjadi Kota yang “Berhati Nyaman” dan Kota ramah bagi pelajar luar daerah. Terjadinya peningkatan angka konflik di Yogyakarta berdampak pada kenyamanan kota. Hal ini diungkapkan oleh Sultan dalam artikel yang dimuat republika.co.id “Yogyakarta kini mengalami kemunduran. Selama 40 tahun, di wilayah ini tidak pernah ada kasus perkelahian antaretnis,” pada Saresehan Penanganan Konflik Sosial, di Sleman.¹³ Dalam keadaan dan realita di lapangan kerap kali muncul buah pertanyaan di benak masyarakat bahwa selama 40 tahun terakhir itu apa yang sudah dilakukan pemerintah sehingga konflik-konflik itu semakin sering terjadi.

¹⁰ Ibid. Umi Salamah.

¹¹ DIY, Paniradya Kaistimewan. *Buku Pelaksanaan Sewindu Keistimewaan DIY 2013-2020*. Yogyakarta: Paniradya Kaistimewan DIY, 2020.

¹² Kaistimewan, Paniradya. *Petunjuk Pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY Tahun 2020*. Yogyakarta: Paniradya Kaistimewan, 2019.

¹³ <https://www.republika.co.id/berita/mkb5or/sultan-sebut-konflik-etnis-usik-kedamaian-yogyakarta>

Kolaborasi yang dilakukan pemerintah Yogyakarta dengan berbagai organisasi seperti dalam penelitian Andi Nur Fiqhi, dkk, yang menemukan bahwa organisasi IKPMDI-Y terlibat dalam kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan spirit multikulturalisme. Dimana IKPMDI-Y merupakan wadah pemersatu antara pelajar/mahasiswa daerah dengan masyarakat, sehingga IKPMDI-Y berperan aktif dalam mewujudkan semangat multikulturalisme di Kota Yogyakarta. Tetapi pada kenyataannya, dalam menanggapi konflik antar identitas yang terjadi, IKPMDI-Y tidak bisa berbuat banyak dalam upaya preventif maupun kuratif.¹⁴ Dilapangan sendiri setelah kejadian konflik tidak ada tindak lanjut atau peran yang terlihat dari beberapa organisasi kemahasiswaan yang terlibat aktif. Evaluasi kolaborasi inilah yang harus dilakukan pemerintah Bersama organisasi-organisasi untuk menciptakan ruang komunitas bagi mahasiswa-mahasiswa luar daerah seperti penyediaan ruang diskusi yang tidak bersinggungan Inagusng dengan tempat umum seperti café, mall, dan lainnya.¹⁵ Jika dilihat dari ketiga filosofi diatas antara poros imajiner, dapat dijadikan refrensi dalam membuat kebijakan atau program dalam menangani konflik-konflik semacam ini. Tempat diskusi komunitas melambangkan poros imajiner berupa fisik sebagai bentuk tersedianya ruang diskusi yang menjunjung keselarasan dan tidak mengganggu masyarakat lainnya. Penataan ruang ini penting mengingat sebuah komunitas akan merasa dihargai ketika tersedianya tempat untuk mereka mengekspresikan pikiran mereka. Dengan mencontoh filosofis poros imajiner kota Yogyakarta dengan keselarasan.¹⁶

Sementara itu, perguruan tinggi negeri maupun swasta sebagai wadah mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki peran penting dalam mengelola kebijakan dan organisasinya, agar tidak terjadi peristiwa intoleran atau diskriminasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 6 ayat 2 juga menjelaskan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Di perguruan tinggi juga diwajibkan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang merupakan materi teori dan praktik bagi mahasiswa sebagai warga negara Indonesia yang berproses dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki misi sebagai pendidikan karakter bertujuan membekali siswa sebagai warga muda yang cerdas (*to be smart and good citizen*), memiliki pengetahuan yang baik dan luas (*knowledge*), memiliki keterampilan yang baik dalam berbangsa dan bernegara (*skills*), memiliki sikap dan nilai yang baik (*attitudes and values*) yang bisa bermanfaat dalam pembentukan rasa kebanggaan terhadap negara dan cinta tanah air. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan mata kuliah ini memiliki peran penting dalam mendukung peran mahasiswa menjadi warga negara yang baik. Namun demikian, mahasiswa tetap harus memahami dan menghayati keberagaman daerah di negara ini. Artinya mahasiswa juga memerlukan pendidikan multikultural lebih dalam, agar dapat konsep kenegaraan lebih komprehensif dan universal sesuai dengan filosofi *Negoro Mowo Toto Deso Mowo Coro*.¹⁷

Konsep *Hamemayu Hayuning Bawana* dapat dijalankan dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan Daerah tentu juga memiliki peran dalam penanganan dan pencegahan kasus intoleran. Kegiatankegiatan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan pelestarian kebudayaan lokal, akan tetapi juga terkait dengan akulterasi budaya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Salah satu kegiatan tersebut adalah Karnaval Budaya Selendang Sutera (Semarak Legenda Suku Nusantara). Ratusan pelajar dan mahasiswa dari seluruh daerah provinsi Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Daerah Indonesia (IKPMDI) di Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti Karnaval Budaya tersebut. Tujuannya adalah untuk menyatukan seluruh budaya dari banyaknya latar belakang pelajar dan mahasiswa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pesan kepada masyarakat bahwa pelajar dan mahasiswa dari luar daerah adalah suatu kesatuan, yang masing-masing memiliki budaya sendiri dan menjadi bentuk akulturasi. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakaukan kegiatan Kemah Budaya, yang diselenggarakan selama satu minggu di Desa Budaya Piyungan. Di tempat tersebut para mahasiswa menginap, dan memperoleh banyak materi pendidikan dan kebudayaan dari lintas daerah, yang disampaikan oleh para budawayan dan pakar. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah telah berupaya untuk menggelar aksi dan mengadakan kegiatan kebudayaan di kalangan mahasiswa sebagai wujud kepedulian terhadap fenomena miris intoleransi di Yogyakarta, namun efektivitas kegiatan tersebut juga masih dipertanyakan karena kasus intoleransi masih saja terjadi.¹⁸

Kejadian kasus intoleran tidak hanya menjadi tugas pemerintah untuk mencegah dan memutus persepsi yang keliru di kalangan masyarakat tentang stereotip perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dari berbagai daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini juga seharusnya dapat bersinergi secara efektif dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena legalitas status mahasiswa terdapat pada institusi tersebut. Berdasarkan kasus di atas maka diperlukan adaptasi baik dari mahasiswa ataupun pelajar daerah yang sedang menempuh pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta, namun juga perlu ada adaptasi dari masyarakat asli maupun luar Yogyakarta dengan keberadaan mahasiswa dari berbagai daerah. Penanaman sikap toleransi tentu sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kasus yang sama terulang kembali. Salah satu solusi yang efektif mengenai penanganan kasus tersebut adalah dengan menggunakan sarana dan prasarana yang sudah ada kemudian dievaluasi, yaitu melalui sinergi antara organisasi etnis kedaerahan dengan lembaga pendidikan tinggi negeri maupun swasta yang

¹⁴ Nusantara.edisi pertama tahun 2012.“Refleksi Sewindu IKPMD INDONESIA YOGYAKARTA”.

¹⁵ Ibid. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/07/083200665/mengapa-konflik-antar-etnis-kerap-terjadi-di-babarsari-yogyakarta-?page=all>

¹⁶ Ibid. Nusantara.

¹⁷ Muhammad Salisul Khakim, Dkk. Kontribusi Mahasiswa Daerah Dalam Penanganan Intoleransi Melalui Sinergi Perguruan Tinggi Di Diy. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 10, Nomor 1, Mei 2020*

¹⁸ Ibid. Muhammad Salisul Khakim

ada, dan tentu dengan pembinaan dan pendampingan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Solusi tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif pembaharuan dan merupakan tindakan preventif dalam mengatasi kasus intoleransi. Dalam hal ini organisasi yang dimaksud adalah Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Daerah Indonesia (IKPMDI) yang akan bertindak sebagai *agent of tolerance*.

IV KESIMPULAN

Sinergitas filosofis Keistimewaan Yogyakarta dengan berbagai konflik identitas yang terjadi beberapa tahun ini dapat dijadikan sebagai titik balik merangkai kebijakan dan program dalam pengelolaan kemanusiaan dan kemajemukan antar semua aspek. Memandang pola kebudayaan sebagai kembalinya jati diri adat dan budaya akan membentuk kemajemukan baik dari masyarakat local maupun masyarakat pendatang. Dengan tiga rancangan filosofi keistimewaan diatas diharapkan mampu memberikan gambaran semua pihak bagaimana harus bertindak dan menindaklanjuti sebuah peristiwa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih atas dukungan serta masukan pihak-pihak terkait beberapa artikel rujukan, dan media berita yang termuat sangat membantu dalam penulisan artikel ini. Terimakasih banyak penulis ucapan kepada pihak jurnal, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengirimkan naskah dan ketersediaannya memberikan penilaian dan penerbitan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurrachman, Elgi Livia (2022) *Politik Identitas Dan Terbentuknya Stereotype Masyarakat Yogyakarta Terhadap Mahasiswa Papua*. Sarjana Thesis, Universitas Siliwangi.
- K. B. Azis, "Kiprah Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X Dalam Refleksi Sewindu Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta," *Journal Of Politic And Government Studies*, Vol. 11, No. 3, Pp. 296-310, Jun. 2022.
- Nasir Muhtar, Mengenalkan Keragaman, Upaya Mencegah Homogenisasi,Klikers.Id
<Https://Www.Klikers.Id/Read/SpecialKlik/Mengenalkan-Keragaman-UpayaMencegahHomogenisasi/?Amp=1>
- Jurnal Smart Studi Masyarakat, Religi Dan Tradisi Volume 06 No. 01 Juni 2020 Website Journal:
<Http://Blasemarang.Kemenag.Go.Id/Journal/Index.Php/Smart> Doi: <Https://Doi.Org/10.18784/Smart.V6i1.988>
- Nusantara, 2011, "Jogja Miniatur Indonesia" Nusantara.Edisi Pertama Tahun 2012."Refleksi Sewindu Ikpmid IndonesiaYogyakarta".
- Umi Salamah. Membangun Karakter Jati Diri Bangsa Melalui Gerakan Literasi Sastra Terhadap Nilai-Nilai Budaya Masa Lalu Dengan Cara Pandang Masa Kini.
- Senasbasa (Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra) Edisi 1 Tahun 2017 Halaman 439-454 E-Issn 2599-0519*
- DIY, Paniradya Kaistimewan. *Buku Pelaksanaan Sewindu Keistimewaan Diy 2013-2020*. Yogyakarta: Paniradya Kaistimewan Diy, 2020.
- Kaistimewan, Paniradya. *Petunjuk Pelaksanaan Dana Keistimewaan Diy Tahun 2020*. Yogyakarta: Paniradya Kaistimewan, 2019.
- Nusantara.Edisi Pertama Tahun 2012."Refleksi Sewindu Ikpmid IndonesiaYogyakarta".
- Muhammad Salisul Khakim, Dkk. Kontribusi Mahasiswa Daerah Dalam Penanganan Intoleransi Melalui Sinergi Perguruan Tinggi Di Diy. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 10, Nomor 1, Mei 2020*
- <Https://Yogyakarta.Kompas.Com/Read/2022/08/24/115018978/Keributan-Pecah-Di-Asrama-Mahasiswa-Papua-Yogyakarta-Satu-Orang-Tewas?Page=L1>
- <Https://Www.Kompas.Com/Tren/Read/2022/07/07/083200665/Mengapa-Konflik-Antar-Etnis-Kerap-Terjadi-Di-Babarsari-Yogyakarta-?Page=All>
- <Http://Hmpsfis.Student.Uny.Ac.Id/2020/11/21/Kebencian-Dan-Diskriminasi-Terhadap-Etnis-Tionghoa-Di-Indonesia/#>
- <Https://Www.Republika.Co.Id/Berita/Mkb5or/Sultan Sebut Konflik-Etnis-Usik-Kedamaian-Yogyakarta>